



**IKHTISAR LHKPN a.n AJI SUCIPTO
(Jenis Laporan - Tahun: Periodik – 2021)
NIK 3175070706830020**

1. DATA PRIBADI

Nama : AJI SUCIPTO
NIK : 3175070706830020
No KK : -
NPWP : 25.517.727.1-008.000
Jenis Kelamin : Laki Laki
Tempat/Tanggal Lahir : INDRAMAYU/7 Juni 1983
Status Nikah : Menikah
Agama : ISLAM
Alamat : JL. SWADAYA VII NO.20 RT.003 RW.01, DUREN SAWIT, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA
Nomor Handphone : 081289074422
Email : adjiesoetjipto@gmail.com
NHK : 725962
Bidang : YUDIKATIF
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA PERMOHONAN - PENGADILAN AGAMA CIBADAK - PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
Tanggal Laporan : 31 Desember 2021
Tanggal Kirim : 20 Januari 2022
Status : Proses Verifikasi



2. DATA KELUARGA

NO	NAMA	HUBUNGAN DENGAN PN	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR / JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	ALAMAT RUMAH
1	MILA SAFITRI	ISTRI	JAKARTA , 18 Mei 1988 / PEREMPUAN	IBU RUMAH TANGGA	JL. SWADAYA VII NO.20 RT.003 RW.01, Kelurahan DUREN SAWIT, Kecamatan DUREN SAWIT, KOTA JAKARTA TIMUR , Provinsi DKI JAKARTA
2	AINIYA AZMI	ANAK TANGGUNGAN	JAKARTA , 19 Mei 2009 / PEREMPUAN	PELAJAR	JL. SWADAYA VII NO.20 RT.003 RW.01, Kelurahan DUREN SAWIT, Kecamatan DUREN SAWIT, KOTA JAKARTA TIMUR , Provinsi DKI JAKARTA
3	ABIYU NURRIZKI	ANAK TANGGUNGAN	JAKARTA , 7 April 2014 / LAKI-LAKI	-	JL. SWADAYA VII NO.20 RT.003 RW.01, Kelurahan DUREN SAWIT, Kecamatan DUREN SAWIT, KOTA JAKARTA TIMUR , Provinsi DKI JAKARTA

3. JABATAN

NO	JABATAN - DESKRIPSI JABATAN / ESELON	LEMBAGA	UNIT KERJA	SUB UNIT KERJA
1	PANITERA MUDA PERKARA PERMOHONAN	MAHKAMAH AGUNG	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	PENGADILAN AGAMA CIBADAK

4. DATA HARTA

4.1. TANAH / BANGUNAN

NO	LOKASI	LUAS	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total					Rp. 0	

4.2. ALAT TRANSPORTASI / MESIN



NO	URAIAN	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jenis : MOTOR Merk : HONDA Model : CBR150 Tahun Pembuatan : 2016 No. Pol. / Registrasi : B 4380 TPE	Jenis Bukti: BPKB/STNK Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI Atas Nama: PN YANG BERSANGKUTAN Pemanfaatan: DIGUNAKAN SENDIRI Lainnya: - Tahun Perolehan: 2020	Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000	UBAH
2	Jenis : MOTOR Merk : HONDA Model : VARIO Tahun Pembuatan : 2014 No. Pol. / Registrasi : B 4019 TBC	Jenis Bukti: BPKB/STNK Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI Atas Nama: PASANGAN/ANAK (MILA SAFITRI) Pemanfaatan: DIGUNAKAN SENDIRI Lainnya: - Tahun Perolehan: 2016	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	UBAH
Sub Total				Rp. 29.000.000	

4.3. HARTA BERGERAK LAINNYA

NO	URAIAN	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total				Rp. 0	

4.4. SURAT BERHARGA

NO	URAIAN	NO. REKENING / NO. NASABAH	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total					Rp. 0	



4.5. KAS / SETARA KAS

NO	URAIAN	INFORMASI REKENING	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jenis : TABUNGAN Keterangan : - Nama Bank / Lembaga : BRI	Nomor : 018601057992501 Atas Nama : PN YANG BERSANGKUTAN	HASIL SENDIRI	Rp. 800.000	UBAH
Sub Total				Rp. 800.000	

4.6. HARTA LAINNYA

NO	URAIAN	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total				Rp. 0	

4.7. HUTANG

NO	URAIAN	NAMA KREDITUR	BENTUK AGUNAN	NILAI AWAL HUTANG	NILAI SALDO HUTANG
1	Jenis : HUTANG KONSUMTIF (KPR, KENDARAAN, KARTU KREDIT, MULTIGUNA) Atas Nama : PN YANG BERSANGKUTAN	BANK BRI	SK PNS	Rp. 120.000.000	Rp. 30.000.000
Sub Total				Rp. 120.000.000	Rp. 30.000.000

5. PENERIMAAN

5.1. PENERIMAAN DARI PEKERJAAN

NO	JENIS PENERIMAAN	PENYELENGGARA NEGARA	PASANGAN
----	------------------	----------------------	----------



NO	JENIS PENERIMAAN	PENYELENGGARA NEGARA	PASANGAN
1	Gaji dan Tunjangan	Rp. 152.209.500	Rp. 0
2	Penghasilan dari Profesi/Keahlian	Rp. 0	Rp. 0
3	Honorarium	Rp. 0	Rp. 0
4	Tantiem, Bonus, Jasa Produksi, THR	Rp. 0	Rp. 0
5	Penerimaan Pekerjaan Lainnya	Rp. 0	Rp. 0
Sub Total		Rp. 152.209.500	Rp. 0

5.2. PENERIMAAN DARI USAHA DAN KEKAYAAN

NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
1	Hasil Investasi dalam Surat Berharga	Rp. 0
2	Hasil Usaha/Sewa	Rp. 0
3	Bunga Tabungan/Deposito dan Lainnya	Rp. 0
4	Penjualan atau Pelepasan Harta	Rp. 0
5	Penerimaan Lainnya	Rp. 0



NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
	Sub Total	Rp. 0

5.3. PENERIMAAN LAINNYA

NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
1	Penerimaan Hutang	Rp. 0
2	Penerimaan Warisan	Rp. 0
3	Penerimaan Hibah/Hadiah	Rp. 0
4	Lainnya	Rp. 0
	Sub Total	Rp. 0

6. PENGELUARAN

6.1. PENGELUARAN RUTIN

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Biaya Rumah Tangga (termasuk transportasi, pendidikan, kesehatan, rekreasi, pembayaran kartu kredit)	Rp. 135.700.000
2	Biaya Sosial (antara lain keagamaan, zakat, infaq, sumbangan lain)	Rp. 10.000.000



NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
3	Pembayaran Pajak (antara lain PBB, kendaraan, pajak daerah, pajak lain)	Rp. 1.000.000
4	Pengeluaran Rutin Lainnya	Rp. 7.000.000
Sub Total		Rp. 153.700.000

6.2. PENGELUARAN HARTA

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Pembelian/Perolehan Harta Baru	Rp. 0
2	Pemeliharaan/Modifikasi/Rehabilitasi Harta	Rp. 0
3	Pengeluaran Non Rutin Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 0

6.3. PENGELUARAN LAINNYA

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Biaya Pengurusan Waris/Hibah/Hadiah	Rp. 0
2	Pelunasan/Angsuran Hutang	Rp. 0



NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
3	Pengeluaran Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 0

7. LAMPIRAN FASILITAS

NO	URAIAN	NAMA PIHAK PEMBERI FASILITAS	KETERANGAN
----	--------	------------------------------	------------

8. TOTAL HARTA KEKAYAAN

NO	TOTAL HARTA	TOTAL HUTANG	TOTAL HARTA KEKAYAAN
1	Rp. 29.800.000	Rp. 30.000.000	Rp. -200.000

Catatan :

Rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan melalui elhkpn.kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.

Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.